



KEBUDAYAAN SEBAGAI PERLAWANAN KREATIF

Strategi Menghadapi Militerisasi dan Hegemoni Kebudayaan di Indonesia

PENULIS

Okky Madasari

Kebudayaan sebagai Perlawanan Kreatif | Strategi Menghadapi Militerisasi dan Hegemoni Kebudayaan di Indonesia

Penulis : Okky Madasari¹

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia tengah menghadapi militerisme jilid baru yang masuk secara sistemik ke dalam struktur kebudayaan dan pendidikan di era rezim Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan negara ini secara agresif mengkooptasi institusi pendidikan formal dan merekonstruksi narasi sejarah nasional demi menormalisasi kehadiran militer dalam ranah sipil serta menghapus memori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.

Naskah ini berangkat dari argumen bahwa perkembangan tersebut merupakan proyek hegemoni kebudayaan dan rekonstruksi pengetahuan (*knowledge production*) yang berupaya membentuk cara berpikir masyarakat mengenai otoritas, disiplin, sejarah, dan kewargaan. Melalui doktrin kedisiplinan semu dan aparatus hegemoni budaya, ruang dialog dan nalar kritis masyarakat sipil terus mengalami penyempitan yang mengkhawatirkan.

Dalam situasi ketika ruang kebudayaan telah terkooptasi, tesis konvensional mengenai "Kebudayaan sebagai Strategi Pembangunan" tidak lagi memadai dan fungsional. Sebagai gantinya, gagasan *Creative Resistance* memosisikan produk budaya, seperti seni, sastra, film, dan lagu, dan pemanfaatan taktis media digital, sebagai instrumen kontrahegemoni (*counter-hegemony*) dan epistemology tandingan. Praktik-praktik kebudayaan berkembang menjadi arena *counter-hegemony* yang memungkinkan masyarakat mempertahankan kebebasan berpikir, merawat memori kolektif, dan menciptakan mekanisme *alternative justice*.

Atas dasar analisis tersebut, naskah ini menawarkan peta jalan gerakan masyarakat sipil dan model konseptual *democratic memory infrastructure*. Kebudayaan direposisi dari sekadar pelengkap pembangunan nasional menjadi gerilya ingatan dan strategi epistemologis jangka panjang untuk mempertahankan ruang sipil.

PENDAHULUAN

Kebudayaan suatu bangsa tidak pernah berdiri di ruang hampa; ia senantiasa berkelindan dengan relasi kuasa, kebijakan ekonomi-politik, dan struktur keamanan yang mendominasinya. Ketika suatu rezim politik dengan latar belakang militerisme kuat memegang kendali eksekutif, kebudayaan dan pendidikan sering kali menjadi sektor pertama yang diinfiltrasi guna

¹ Tulisan ini dipresentasikan dalam pertemuan FIAD yang diadakan di UGM pada tanggal 30 Juli 2026, yang dihadiri antara lain oleh Asfinawati, Sulistyowati Irianto, Wening Udasmoro, Baiquni, Okky Madasari, Zainal Bagir, Novrizal Bahar, dan Usman Hamid. Tulisan ini telah melalui proses *peer review* oleh M. Baiquni dan Manneke Budiman.

menciptakan kepatuhan massal tanpa kekerasan fisik langsung (*soft coercion*). Isu militerisasi sipil di Indonesia saat ini menjadi sangat krusial karena ia mengancam fondasi paling mendasar dari demokrasi: kebebasan berpikir dan hak atas kebenaran sejarah.

Alih-alih memperkuat supremasi sipil, negara justru memperluas keterlibatan institusi militer ke dalam berbagai sektor sipil (Imparsial, 2026). Fenomena tersebut hadir melalui reinkarnasi militerisme jilid baru yang masuk secara gradual, terstruktur, dan memperoleh legitimasi melalui wacana pembangunan nasional.

Jika penetrasi ini dibiarkan tanpa adanya strategi tandingan yang konkret, masyarakat Indonesia akan mengalami proses pendangkalan nalar kritis secara masif. Karakteristik militerisme yang kaku, hierarkis, dan antikritik secara hakiki bertolak belakang dengan sifat kebudayaan yang inklusif, cair, dan reflektif. Oleh karena itu, memetakan kembali posisi kebudayaan di tengah kepungan militerisme bukan sekadar agenda intelektual semata, melainkan sebuah urgensi eksistensial bagi masa depan demokrasi dan literasi di Indonesia.

Penempatan taruna Akademi Militer (Akml) dan Akademi Kepolisian (Akp) dalam pembinaan karakter di sekolah umum (Kompas, 2024), pendirian sekolah berdisiplin militer seperti "Sekolah Garuda" dan "Sekolah Rakyat" (BBC News Indonesia, 2024), serta penyusunan ulang sejarah nasional, (Tempo, 2025), memperlihatkan meluasnya hegemoni militer ke dalam ranah sipil. Contoh-contoh penyusupan militerisme dan pola pikir militeristik di bidang pangan dan distribusi kebutuhan sehari-hari dapat dilihat dari sistem komando terpusat manajemen program bergizi gratis (MBG) yang dikelola banyak petinggi militer dan polisi, serta pelatihan cara militer terhadap manajer-manajer Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam perspektif sosiologi politik dan sosiologi pengetahuan, perkembangan tersebut merupakan transformasi mendalam atas bagaimana negara mendefinisikan, mengategorikan, dan mengontrol pengetahuan publik (Mannheim, 1936; Foucault, 1980).

Pergeseran ini ditandai oleh empat manifestasi krisis utama:

- Infiltrasi Militer dalam Ekosistem Pendidikan Formal: Pengerahan taruna militer ke sekolah umum serta pendirian sekolah berdisiplin militer menormalisasi kultur komando dalam ruang tumbuh kembang anak (Tempo, 2024). Langkah ini membungkus indoktrinasi atas nama "kedisiplinan nasional", merusak iklim pendidikan merdeka, dan menanamkan kepatuhan buta (*blind obedience*).
- Amputasi Sejarah Nasional dan Pemutihan Dosa Masa Lalu (*State-Sponsored Amnesia*): Rezim secara sistematis merekonstruksi penulisan sejarah resmi negara untuk melenyapkan catatan kelam pelanggaran HAM, penculikan aktivis 1997/1998, dan operasi militer masa lalu (Komnas HAM, 2020; KontraS, 2022). Narasi sejarah direduksi menjadi alat glorifikasi heroisme militer dan memutus rantai akuntabilitas moral.
- Kelumpuhan Fungsi Kebudayaan dalam Skenario Pembangunan Berbasis Rezim: Gagasan ideal untuk menempatkan kebudayaan sebagai hulu pembangunan nasional kini menemui jalan buntu. Di bawah rezim otoritarianisme digital dan militeristik, kebudayaan diadopsi oleh negara sekadar sebagai kosmetik pariwisata atau komoditas industri pop yang jinak, sementara watak kritisnya dikebiri.
- Proses ini berjalan bersisian dengan mekanisme manipulasi digital (Lim, 2017; Wijayanto & Berenschot, 2021). Rezim memanfaatkan ekosistem digital secara masif melalui pasukan

siber (*cyber troops*) dan pembuat konten bayaran (*influencers*) untuk memoles citra militer menjadi ramah dan bercorak pop melalui *gimmick-driven politics* (*The Jakarta Post*, 2024; SAFEnet, 2023). Hal ini mengelabui generasi muda yang tidak mengalami langsung represi masa lalu, sekaligus mempersempit ruang nalar kritis.

Secara konvensional, kebudayaan diposisikan sebagai instrumen pembangunan (*culture for development*) atau komoditas ekonomi kreatif (UNESCO, 2013). Namun, dalam konteks penyempitan ruang sipil, paradigma "Kebudayaan Sebagai Strategi Pembangunan" kami nilai tidak lagi memadai dan fungsional. Paradigma tersebut berisiko menjebak masyarakat sipil dalam pragmatisme rezim yang mengukur keberhasilan budaya hanya dari perputaran ekonomi atau festival seremonial.

Oleh karena itu, strategi kebudayaan harus mengalami perubahan epistemologis menjadi Budaya sebagai Perlawanan Kreatif (*Creative Resistance*) (Duncombe, 2002; Scott, 1990). Kebudayaan tidak dijadikan sebagai objek pasif kebijakan pemerintah, melainkan sebagai garis depan kontra-hegemoni (*counter-hegemony*) (Gramsci, 1971). Konsep ini memanfaatkan kelenturan ekspresi kreatif untuk menyuntikkan kesadaran kritis dan gagasan utopis secara subliminal ke dalam benak publik.

Naskah ini menyintesis lima tradisi pemikiran kritis yang dipadukan dengan enam etika lokal Nusantara sebagai landasan untuk memahami kebudayaan sebagai ruang perlawanan dan pembentukan kesadaran. Kebudayaan dapat berfungsi sebagai ruang kontestasi terhadap dominasi melalui pembentukan *counter-hegemony* (Gramsci, 1971), ketika narasi dan ekspresi budaya digunakan untuk mempertanyakan *common sense* yang dibentuk oleh kekuasaan. Proses ini juga merupakan kontestasi epistemologis (Mannheim, 1936) antara Ideologi Total yang membentuk cara pandang dominan dan Kesadaran Utopis yang diproduksi kelompok-kelompok yang menantang tatanan tersebut. Dalam kondisi ketika ruang publik mengalami kolonisasi oleh logika negara dan pasar, kebudayaan dapat menjadi *alternative public sphere* yang memungkinkan dialog, refleksi, dan artikulasi kebebasan (Habermas, 1984, 1987), sementara teknologi reproduksi digital memperluas jangkauan ekspresi budaya perlawanan dan bahkan dapat memperkuat perhatian publik ketika terjadi penyensoran (Benjamin, 1936/2008). Matriks integrasi dari tradisi pemikiran kritis tersebut disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1. *Matriks Integrasi Teoretis*

Tokoh / Teori	Tingkat Analisis	Peran Konseptual dalam Artikel
Antonio Gramsci (Hegemoni)	Makro-Politik	Menjelaskan bagaimana negara membangun persetujuan publik (<i>consent</i>) melalui institusi sipil.
Karl Mannheim (Sosiologi Pengetahuan)	Epistemologis	Menjelaskan pertarungan pengetahuan antara Ideologi Total negara (militerisme) vs. Utopia perlawanan budaya.
Jürgen Habermas (Tindakan Komunikatif)	Ruang Publik	Menjelaskan bagaimana kebudayaan memulihkan ruang deliberasi kritis yang dikolonisasi kekuasaan.
Walter Benjamin (Reproduksi Digital)	Media & Estetika	Menjelaskan cara kerja taktis reproduksi seni/konten digital dalam merobohkan sensor.

Sumber: *Olahan penulis*

Berbagai etika lokal dapat menjadi akar legitimasi moral bagi *creative resistance*, sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara memiliki tradisi pemikiran yang dapat menjadi dasar untuk menolak dominasi dan merawat memori kolektif. Berbagai tradisional Nusantara tersebut adalah:

1. ***Siri' na Pacce (Bugis-Makassar)***: *Siri'* menuntut penjagaan martabat kemanusiaan, sedangkan *Pacce* adalah empati mendalam terhadap penderitaan sesama. Menolak pembungkaman adalah wujud penegakan *Siri' na Pacce*.
2. ***Pela Gandong (Maluku)***: Ikatan persaudaraan lintas batas sosial sebagai dasar etis membangun koalisi masyarakat sipil menolak politik adu domba.
3. ***Huma Betang (Dayak)***: Kebersamaan dan kesetaraan dalam satu rumah besar bersama, menegaskan ruang publik yang terbuka dan inklusif.
4. ***Tri Hita Karana (Bali)***: Keseimbangan hubungan manusia, sesama, dan alam, menolak pendekatan keamanan yang destruktif.
5. ***Sipoko Mase-mase (Toraja) & Gotong Royong (Jawa)***: Tradisi saling menopang dalam mendirikan ruang belajar mandiri dan jaringan kebudayaan independen.

Naskah ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan metode *integrative literature review* yang dipadukan dengan kerangka Analisis Sosiologi Pengetahuan (*Sociological Analysis of Knowledge*) Karl Mannheim (1936). Pendekatan terintegrasi ini menyintesis dokumen kebijakan, literatur akademik, serta ekspresi budaya untuk membedah bagaimana pengetahuan diproduksi, distrukturkan, dan dilawan. Sumber data dikelompokkan menjadi empat kategori utama yakni Literatur Akademik Teoretis, Dokumen Hukum dan Kebijakan, Laporan Media dan Investigasi, Produk Budaya (sastra, musik, seni visual, sinema, media digital).

Analisis data dilakukan melalui analisis tematik epistemologis dalam tiga tahapan berurutan. Pertama, Analisis Ideologis (Dekonstruksi *State Total Ideology*): memetakan bagaimana logika komando, sekuritisasi, dan *state-sponsored amnesia* diproduksi oleh negara sebagai kebenaran mutlak (Mannheim, 1936). Kedua, Analisis Utopis (Pemetaan *Utopian Consciousness*): menganalisis bagaimana produk budaya bekerja sebagai *alternative social archive*, *alternative public sphere*, dan *alternative space of justice*. Ketiga, Sintesis Epistemologis: merumuskan model *Democratic Memory Infrastructure* dan menyusun rencana aksi kebijakan tripartit.

TEMUAN DAN ANALISIS

Temuan 1. Produksi Hegemoni dan Ideologi Total: Normalisasi Militerisme dalam Ruang Sipil

Rekonstruksi Militerisasi dan Kodifikasi Logika Komando. Remiliterisasi Indonesia kontemporer bekerja sebagai proses pembentukan *State Total Ideology* (Mannheim, 1936; Mietzner, 2019). Rezim memasukkan nilai-nilai militeristik ke dalam ranah sipil sedemikian rupa sehingga kepatuhan, hierarki, dan disiplin komando dipersepsikan sebagai pandangan dunia (*Weltanschauung*) yang tunggal dan wajar, bahkan superior.

Pendidikan sebagai Aparatus Ideologi: Mengikis Nalar Kritis. Pendidikan merupakan aparatus hegemoni dan arena penanaman ideologi yang vital (Gramsci, 1971; Mannheim, 1936). Kebijakan pengiriman taruna Akmil/Akpol ke sekolah umum (Kompas, 2024) serta pendirian sekolah berdisiplin militer seperti "Sekolah Garuda" dan "Sekolah Rakyat" (BBC News Indonesia, 2024) merupakan bentuk rekayasa mental generasi muda. Langkah ini membungkus indoktrinasi politik dalam kemasan "kedisiplinan nasional". Sekolah yang semestinya menjadi tempat pembentukan nalar kritis digeser fungsinya menjadi arena pencetakan kepatuhan buta (*blind obedience*) terhadap otoritas negara.

Politik Memori dan Penulisan Ulang Sejarah (State-Sponsored Amnesia). Negara yang berupaya memantapkan Ideologi Total harus menguasai narasi masa lalu (Mannheim, 1936). Melalui *state-sponsored amnesia*, rezim secara sistematis merekonstruksi penulisan sejarah resmi (Komnas HAM, 2020; LBH Jakarta, 2023). Fokus utamanya adalah menghapus atau menyederhanakan bab-bab kelam pelanggaran HAM, seperti peristiwa 1965–1966, kerusuhan Mei 1998, penculikan aktivis 1997/1998, dan operasi militer di daerah konflik. Sejarah direduksi menjadi alat glorifikasi heroisme militer untuk memutus rantai akuntabilitas moral.

Hegemoni Kebudayaan dan Normalisasi via Ruang Digital. Normalisasi militerisme disempurnakan melalui manipulasi media dan ruang digital (Lim, 2017; Wijayanto & Berenschot, 2021). Rezim mengerahkan *cyber troops* dan *content creator* bayaran untuk mempopulerkan narasi *gimmick* yang menampilkan militer sebagai sosok yang ramah, populer, dan humoris (*The Jakarta Post*, 2024; SAFEnet, 2023). Strategi ini secara efektif menutupi watak otoriter rezim, menjauhkan ingatan publik dari represi, dan menjadikan kebudayaan sekadar kosmetika pariwisata atau komoditas pop yang jinak.

Temuan 2. Budaya sebagai Perlawanan Kreatif (Creative Resistance)

Sastra dan Bahasa Perlawanan: Membongkar Propaganda. Sastra tidak pernah menjadi teks yang netral; ia beroperasi sebagai medan pertarungan epistemologis antara narasi resmi negara dan kebenaran empiris warga (Scott, 1990; Duncombe, 2002). Ketika bahasa resmi negara mengalami pendangkalan melalui akronim-akronim eufemistis dan propaganda pembangunan, karya sastra hadir mengembalikan kejujuran berbahasa dan membongkar *State Total Ideology* (Mannheim, 1936).

Penyusupan Kesadaran Kritis: Melalui novel-novel yang mengangkat soal sejarah Orde Baru seperti *Entrok*, *Laut Bercerita* dan sebagainya, sedang dibangun kesadaran kritis atas sejarah bangsa dan upaya manipulasi sejarah serta militerisasi yang sedang terjadi hari ini. Puisi-puisi Wiji Thukul, seperti *Peringatan* dan *Bunga dan Tembok*, beroperasi sebagai teks kontrahegemoni yang melampaui zamannya. Seruan Thukul ("*hanya ada satu kata: lawan!*") merekonstruksi bahasa perlawanan yang terus dikutip dalam setiap aksi demonstrasi jalanan dan gerakan mahasiswa kontemporer. Puisi Thukul membuktikan bahwa meskipun penyairnya dihilangkan secara paksa oleh aparatus keamanan, karya budayanya tetap hidup sebagai kesadaran utopis yang memicu keberanian sipil.

Musik Protes dan Subversi Gelombang Suara. Musik merupakan medium ekspresi budaya yang memiliki daya jangkauan emosional dan pemicu mobilisasi massal yang sangat cepat (Street,

2012). Melalui ritme, lirik, dan performativitas, musik protes mentransformasikan keresahan individu menjadi kesadaran kolektif.

- **Subversi Lirik Sukatani:** Lagu *Bayar Bayar Bayar* karya grup musik Sukatani memberikan kritik lugas terhadap komersialisasi kehidupan, biaya hidup yang mencekik, dan ketimpangan ekonomi di tengah wacana keberhasilan pembangunan yang digelorakan pemerintah (*Kompas*, 2023). Musik Sukatani menjadi narasi tandingan atas statistik resmi negara, serta mengartikulasikan pengalaman riil masyarakat kelas pekerja yang terpinggirkan.
- **Tradisi Musik Protes Lintas Generasi:** Praktik ini meneruskan tradisi panjang musik kritis Indonesia, dari Iwan Fals, Kantata Takwa, Ebiet G. Ade dan Bimbo pada era 1980-an dan 1990-an hingga band-band independen kontemporer seperti Navicula, Efek Rumah Kaca, dan Banda Neira. Musik protes memulihkan *tindakan komunikatif* Habermas (1984) dengan menyediakan ruang deliberasi informal di mana pendengar diajak mempertanyakan keadilan sosial dan penyalahgunaan kekuasaan.

Seni Visual, Mural, dan Pendudukan Ruang Publik. Di tengah penyempitan ruang digital dan pembatasan izin demonstrasi di jalanan, dinding-dinding kota menjadi arena kontestasi politik yang sangat efektif (Mitchell, 2002). Seni visual jalanan dan mural merebut kembali ruang publik (*reclaiming public space*) dari dominasi reklame komersial dan propaganda politik negara.

- Mural Politik di Trisakti, Wadas, dan Cirebon/Vina: Mural-mural perlawanan di sekitar kampus Trisakti merawat memori kolektif penembakan mahasiswa 1998; mural di Wadas, Jawa Tengah, merekam penolakan warga terhadap pengerahan aparat militer-kepolisian dalam penambangan andesit (*Tempo*, 2022); sementara mural kritik di Cirebon terkait kasus Vina menunjukkan bagaimana seni visual jalanan menjadi instrumen warga menuntut keadilan atas peradilan yang berbelit dan manipulatif (*BBC News Indonesia*, 2024).
- Persekusi Mural dan *Streisand Effect*: Respons represif aparat, seperti penghapusan mural "Tuhan Aku Lapar" atau "Dibungkam", secara teoretis dijelaskan oleh Benjamin (1936/2008). Penghapusan mural di dinding fisik memicu dokumentasi foto yang kemudian direproduksi secara masif di media sosial (SAFEnet, 2023). Tindakan represi justru melipatgandakan jangkauan pesan (*Streisand effect*), membuktikan bahwa upaya penghapusan ingatan (*amnesia*) selalu kalah oleh reproduksi digital perlawanan.

Sinema sebagai Arsip Sosial Tandingan (*Alternative Social Archive*). Film tidak sekadar hiburan visual, melainkan arsip tandingan yang merekam fakta sosial, trauma publik, dan ketidakadilan sistemik yang kerap dieliminasi dari buku sejarah resmi. Film Rekonstruksi Sejarah dan Keadilan:

- *Sum Kuning / Perawan Desa* (1980) dan *Marsinah: Cry Justice* (2001) merekam jejak rekayasa hukum dan kekerasan terstruktur aparat rezim terhadap perempuan sipil dan buruh (KontraS, 2022).
- *Istirahatlah Kata-Kata* (2016) merawat memori mengenai kejahatan penculikan aktivis dan membongkar mitos pahlawan negara dengan menampilkan humanitas serta ketakutan para korban represi.

- *Vina: Before 7 Days* (2024) memperlihatkan bagaimana sinema pop kontemporer mampu menggerakkan kemarahan publik atas sikap kompromistis penegakan hukum dan kelalaian institusi kepolisian (*The Jakarta Post*, 2024).

Melalui sinema, masyarakat membangun *Democratic Memory Infrastructure*, sebuah perpustakaan visual yang menjaga agar luka sejarah tidak dipulihkan secara palsu oleh retorika rekonsiliasi tanpa keadilan (*reconciliation without justice*).

Taktik Siber, Mikro-Narasi, dan Solidaritas Regional (SEAbings). Ruang siber telah menjadi medan pertarungan utama antara *cyber troops* pelindung hegemoni negara dan jaringan aktivisme siber sipil (Wijayanto & Berenschot, 2021; Lim, 2017). Pemerintahan Joko Widodo dan kemudian Prabowo Subianto memakai dunia digital ini untuk merepresi dan menyerang suara kritis komponen masyarakat sipil yang belum mempunyai strategi terpadu menghadapi serbuan kekuasaan ini. Paper ini antara lain bertujuan mengusulkan strategi jangka pendek, menengah dan Panjang untuk melawan narasi dan hegemoni negara dalam dunia digital

- Tagar Perlawanan Sipil: Gerakan digital melalui tagar #IndonesiaDarurat dan #IndonesiaGelap terbukti mampu memobilisasi ratusan ribu warga untuk mengawasi pembahasan UU Pilkada dan kebijakan kontroversial DPR pada pertengahan 2024 (*Kompas*, 2024; *BBC News Indonesia*, 2024). Mikro-narasi berbentuk konten mikro, utas analitis, dan meme politik memecah bahasa tebal dokumen kebijakan menjadi poin-poin yang mudah dipahami publik.
- Jejaring Solidaritas Regional (*Milk Tea Alliance & SEAbings*): Gerakan siber Indonesia kini terhubung dengan jaringan aktivis Asia Tenggara (Thailand, Myanmar, Filipina) melalui aliansi *SEAbings*. Jaringan ini bertukar strategi taktis perlawanan digital, meretas propaganda militer, dan saling menguatkan dalam menghadapi rezim otoritarian regional (Tapsell, 2020).

Temuan 3. Model Konseptual: Democratic Memory Infrastructure

Defisit Pendekatan Kelembagaan dan Urgensi Infrastruktur Budaya. Sebagian besar studi transisi dan konsolidasi demokrasi berfokus secara eksklusif pada kelembagaan formal: pemilu, partai politik, peradilan, dan parlemen (Huntington, 1991; Diamond, 1999). Namun, ketika institusi-institusi formal tersebut mengalami kooptasi dan "pembusukan dari dalam" (*democratic decay*) oleh oligarki dan elite militer (Aspinall & Warburton, 2020; Mietzner, 2019), pendekatan kelembagaan menjadi tumpul.

Di sinilah dibutuhkan model konseptual baru: *Democratic Memory Infrastructure* (Infrastruktur Memori Demokratis). Model ini menegaskan bahwa daya tahan demokrasi tidak hanya bertumpu pada struktur politik formal, melainkan pada kapasitas masyarakat sipil untuk memelihara memori kolektif, memproduksi pengetahuan kritis, dan menjaga nilai-nilai kebebasan melalui kebudayaan.

Pilar-Pilar Infrastruktur Memori Demokratis

- Arsip Tandingan (*Alternative Social Archive*): Dokumentasi independen atas kejahatan HAM, konflik agraria, dan kesaksian korban yang dikelola secara terdesentralisasi (digital dan fisik) agar tidak dapat dihapus oleh negara.
- Ruang Publik Kontrahegemonik (*Counter-Hegemonic Public Sphere*): Komunitas seni, ruang kolektif warga, dan media independen yang menjalankan *tindakan komunikatif* Habermas (1984) bebas dari intervensi aparatus keamanan.
- Pendidikan Kewargaan Kritis (*Critical Civic Education*): Inisiatif pembelajaran mandiri yang membongkar *State Total Ideology* dan mengajarkan sejarah secara jujur
- Jejaring Solidaritas Etik (*Ethical Solidarity Network*): Penguatan ikatan sosial berbasis nilai-nilai etika lokal (*Siri' na Pacce, Pela Gandong, Huma Betang*) sebagai benteng pertahanan moral melawan politik adu domba kekuasaan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk memandu gerakan masyarakat sipil, seniman, akademisi (*freischwebende Intelligenz*), dan aktivis dalam merespons militerisasi, dirumuskan rencana aksi jangka pendek, menengah, dan panjang yang sistematis:

Rekomendasi Jangka Pendek (1–6 Bulan): Konsolidasi Siber dan Mikro-Narasi Digital

- Pembuatan Kampanye Mikronarasi Ramah Algoritma: Memproduksi infografis, meme politik, dan video durasi pendek yang menerjemahkan bahaya militerisasi birokrasi dan sekuritisasi ke dalam bahasa sehari-hari publik sipil.
- Pembentukan Konsorsium *Freischwebende Intelligenz*: Membangun *core group* terhubung antara akademisi, budayawan, jurnalis investigasi, dan pekerja seni untuk merespons secara cepat setiap retorika sekuritisasi negara.
- Pelatihan Keamanan Digital & *Digital Hygiene*: Mengorganisasi pelatihan enkripsi data, perlindungan identitas digital, dan penanganan teror siber bagi aktivis kebudayaan dan mahasiswa.

Rekomendasi Jangka Menengah (6 Bulan–2 Tahun): Pelembagaan Infrastruktur Kebudayaan Mandiri

- Pendirian "Sekolah Rakyat Kreatif": Mengembangkan ruang belajar alternatif di tingkat komunitas/ruang publik mandiri untuk mengajarkan sejarah kritis, hak asasi manusia, dan literasi media guna menandingi indoktrinasi sekolah berdisiplin militer.
- Produksi Karya Audio-Visual Berbasis Sastra Perlawanan: Mengadaptasi puisi-puisi perlawanan, novel kritis, dan laporan investigasi media menjadi film pendek, teater jalanan, dan album musik kompilasi.
- Pembangunan Arsip Digital Terdesentralisasi: Membangun basis data terbuka (*open-source*) berbasis teknologi *cloud* terenkripsi untuk menyimpan dokumen kejahatan HAM, jejak kebijakan militerisasi, dan karya seni yang dilarang/dihapus negara.

Rekomendasi Jangka Panjang (2–5 Tahun): Internasionalisasi Isu dan Intervensi Transisi Politik

- Diplomasi Budaya Independen via Jaringan Regional: Membawa isu kemunduran demokrasi dan remiliterisasi Indonesia ke forum-forum kebudayaan internasional dan jejaring *SEAbings* untuk menggalang tekanan diplomatik internasional.
- Penguatan Gerakan *Citizen Writers* dan Jurnalisme Warga: Melatih ribuan warga di daerah konflik agraria dan proyek strategis nasional untuk mendokumentasikan serta menuliskan sendiri realitas di wilayah mereka.
- Intervensi Diskursus Kebijakan Publik: Menggunakan seluruh lumbung karya budaya dan bukti empiris arsip tandingan untuk mendesak reformasi kebijakan sektor pertahanan dan pemulihan supremasi sipil menjelang transisi politik nasional.

PENUTUP

Naskah ini menunjukkan bahwa remiliterisasi kontemporer di Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ekspansi kelembagaan militer ke dalam ranah sipil. Remiliterisasi juga berlangsung melalui produksi hegemoni budaya negara yang menormalisasi logika keamanan, disiplin, hierarki, dan kepatuhan dalam berbagai bidang kehidupan sosial, termasuk pendidikan, politik memori, tata kelola kesejahteraan, dan komunikasi publik.

Berbeda dengan literatur yang cenderung menempatkan masyarakat sipil sebagai korban pasif ekspansi negara, naskah ini menunjukkan bahwa masyarakat terus mengembangkan berbagai bentuk *Creative Resistance* melalui sastra, musik, seni visual, film, dan media digital. Praktik-praktik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kritik terhadap kekuasaan, tetapi juga sebagai mekanisme produksi dan reproduksi memori kolektif, solidaritas sosial, ruang deliberasi, dan imajinasi demokratis, atau apa yang disebut oleh artikel ini sebagai *Democratic Memory Infrastructure*.

Naskah ini juga menunjukkan bahwa daya tahan *Creative Resistance* tidak hanya bersumber dari produksi budaya itu sendiri, tetapi juga dari fondasi etis yang hidup dalam berbagai tradisi lokal Indonesia (*Ethical Foundations of Democratic Resilience*). Nilai-nilai ini misalnya Siri' na Pacce dari Bugis-Makassar, Pela Gandong dari Maluku, Huma Betang dari Dayak, Tri Hita Karana dari Bali, dan Gotong Royong yang dianut oleh hampir semua suku di Indonesia. Nilai-nilai lokal seharusnya menjadi sumber penting legitimasi moral demokrasi di Indonesia.

Secara teoretis, pendirian ini memberikan tiga kontribusi utama. Pertama, memperluas kajian remiliterisasi dari dimensi institusional menuju dimensi kultural. Kedua, menghubungkan literatur hubungan sipil-militer dengan kajian memori, kebudayaan, dan demokrasi. Ketiga, mengajukan model *Democratic Memory Infrastructure* sebagai kerangka konseptual untuk memahami bagaimana demokrasi dipertahankan melalui produksi budaya dan fondasi etis masyarakat.

Posisi pendirian ini menunjukkan bahwa perlindungan demokrasi tidak dapat hanya bergantung pada institusi formal, pemilu, atau reformasi hukum. Demokrasi juga membutuhkan investasi pada kebudayaan, pendidikan kritis, pelestarian memori kolektif, dan penguatan komunitas-komunitas lokal yang menjadi sumber nilai dan solidaritas sosial. Penelitian

selanjutnya dapat menguji model *Democratic Memory Infrastructure* dalam konteks negara-negara lain yang mengalami remilitarisasi, sekuritisasi, atau kemunduran demokrasi.

Pada akhirnya, demokrasi tidak hanya bertahan melalui konstitusi, pemilu, atau lembaga negara. Demokrasi juga hidup dalam cerita yang terus diceritakan, lagu yang terus dinyanyikan, mural yang terus dilukiskan, film yang terus diproduksi, dan nilai-nilai yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketika ruang sipil menyempit dan logika militer semakin dinormalisasi, praktik-praktik kebudayaan tersebut menjadi lebih dari sekadar ekspresi artistik; ia menjadi infrastruktur memori yang memungkinkan masyarakat mengingat, membayangkan, dan mempertahankan kemungkinan-kemungkinan demokratis di masa depan. Ia memungkinkan masyarakat untuk melawan.

DAFTAR RUJUKAN

- Aspinall, E., & Warburton, E. (Eds.). (2020). *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Benjamin, W. (2008). *The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility, and Other Writings on Media* (E. Jephcott dkk, Trans.). Cambridge, MA: Harvard University Press. (Karya asli diterbitkan 1936).
- Diamond, Larry. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Duncombe, S. (Ed.). (2002). *Cultural Resistance Reader*. London & New York: Verso.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*. New York: Pantheon Books.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks* (Q. Hoare & G. N. Smith, Eds. & Trans.). New York: International Publishers.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society* (T. McCarthy, Trans.). Boston: Beacon Press.
- Habermas, J. (1987). *The Theory of Communicative Action, Vol. 2: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason* (T. McCarthy, Trans.). Boston: Beacon Press.
- Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the ruins of democracy in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427.
- Mannheim, K. (1936). *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge* (L. Wirth & E. Shils, Trans.). London: Routledge & Kegan Paul.
- Mietzner, M. (2019). Democratic illiberalism and the decline of civil liberties in Indonesia. *Asian Survey*, 59(4), 595–616.
- Mitchell, W. J. T. (2002). *Landscape and Power* (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- Scott, J. C. (1990). *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. New Haven: Yale University Press.
- Street, J. (2012). *Music and Politics*. Cambridge: Polity Press.
- Tapsell, R. (2020). *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Wijayanto, & Berenschot, W. (Eds.). (2021). *Demokrasi di Era Digital: Pasukan Siber, Disinformasi, dan Manipulasi Opini Publik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

- Imparsial. (2026). *Bahaya Remiliterisasi Bagi Demokrasi*. Jakarta: Imparsial (The Indonesian Human Rights Monitor).
- Komnas HAM. (2020–2023). *Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Evaluasi Penuntasan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dan Perlindungan Kebebasan Sipil*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- KontraS. (2022–2023). *Catatan Kelam Pelanggaran HAM dan Bayang-Bayang Militarisme dalam Sektor Sipil*. Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan.
- LBH Jakarta. (2023–2024). *Laporan Catatan Akhir Tahun: Penyempitan Ruang Sipil, Rekayasa Hukum, dan Kriminalisasi Kebebasan Berekspresi*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- SAFEnet. (2022–2023). *Laporan Hak-Hak Digital Indonesia: Represi Siber, Operasi Cyber Troops, dan Sensor Kreatif*. Denpasar: Southeast Asia Freedom of Expression Network.
- UNESCO. (2013). *Creative Economy Report 2013 Special Edition: Widening Local Development Pathways*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- BBC News Indonesia. (2024, Maret 12). *Fenomena Sekolah Berdisiplin Militer dan Infiltrasi Taruna di Sekolah Umum: Pembentukan Karakter atau Indoktrinasi?* BBC News Indonesia.
- BBC News Indonesia. (2024, Juni 20). *GELAP / DARURAT: Perlawanan Warga Net Melawan Pembahasan RUU Pilkada di DPR*. BBC News Indonesia.
- Kompas. (2023, Mei 14). *Lagu Protes dan Fenomena Kritik Sosial Musisi Independen Kontemporer*. Kompas.com.
- Kompas. (2024, Agustus 22). *Gerakan #IndonesiaDarurat: Saat Media Sosial Menjadi Benteng Terakhir Demokrasi*. Kompas.com.
- Tempo. (2022, Februari 11). *Pengerahan Aparat dan Tindakan Koersif dalam Konflik Agraria di Desa Wadas*. Majalah Tempo.
- Tempo. (2024, Februari 28). *Analisis Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis dan Keterlibatan Struktur Komando*. Majalah Tempo.
- Tempo. (2025, Agustus 12). *Rilis Penulisan Ulang Sejarah Batal 17 Agustus 2025. Kenapa?* Tempo.com.
- The Jakarta Post. (2024, April 18). *Gimmick Politics, AI-driven campaigns, and the romanticization of military figures among youth*. The Jakarta Post.
- The Jakarta Post. (2024, Juli 02). *Cinema and Social Justice: How Pop Films Reopen Unresolved Crime Cases in Indonesia*. The Jakarta Post.



Terima kasih telah membaca kajian ini.

FIAD terbuka bagi siapa saja yang memiliki kepedulian, pengetahuan, pengalaman, atau keahlian yang ingin dibagikan untuk kepentingan publik.

Gabung di bit.ly/GabungFIAD